THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

Jl. HOS. Cokroaminoto No 92, Menteng, Kota Jakarta
Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310
Telepon: +6221 3158032
Email: contact@theindonesianinstitute.com
www.theindonesianinstitute.com

RINGKASAN EKSEKUTIF

"Evaluasi 200 Hari Menteri Kabinet Merah Putih"

Pada 8 Mei 2025, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka genap menjabat selama 200 hari sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Selama periode ini, sejumlah kebijakan mereka—seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembentukan Badan Pengelola Investasi Danantara, pendirian bank emas, hingga revisi UU TNI—menjadi sorotan publik dan menuai beragam respons.

Beberapa lembaga dan organisasi masyarakat sipil telah berperan dalam mengawal pemerintahan baru Indonesia ini melalui beragam penelitian. Misalnya, evaluasi 100 hari pemerintahan oleh CELIOS menunjukkan skor kinerja Prabowo 5/10 dan Gibran 3/10 yang mana beberapa menteri dinilai berkinerja buruk. Sementara, survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) mendapatkan 81,4% responden puas dengan kinerja Presiden Prabowo Subianto.

Sebagai bagian dari masyarakat sipil yang fokus pada pengawasan kebijakan publik, The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) melakukan evaluasi terhadap kinerja 48 menteri Kabinet Merah Putih. Penilaian ini mencakup aspek **komunikasi publik, partisipasi publik, kolaborasi lintas sektor, konsistensi kebijakan, serta beberapa indikator *Key Performance Indicators* (KPI)**. Menggunakan pendekatan *mixed methods*, TII memadukan skoring kuantitatif dengan analisis kualitatif melalui *desk research* dan wawancara mendalam semi-struktur bersama para ahli dari latar belakang **pengamat kebijakan publik, aktivis, akademisi, pengusaha, dan praktisi** guna memberikan konteks dan pandangan yang lebih dalam terhadap hasil analisis evaluasi dan skoring. TII juga menggunakan Teori *Multiple Streams* (Kingdon, 1984) dan Teori Jaringan Kebijakan (Rhodes, 1997).

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa terdapat 14 kelompok peringkat untuk 48 menteri yang dinilai yang dapat dilihat sebagai berikut:

Peringkat	Nama Menteri	Jabatan	Skor
1	Yassierli	Menteri Ketenagakerjaan	18
2	Sri Mulyani Indrawati	Menteri Keuangan	17
3	Budi Gunadi Sadikin	Menteri Kesehatan	16
	Meutya Viada Hafid	Menteri Komunikasi dan Digital	16
	Teuku Riefky Harsya	Menteri Ekonomi Kreatif	16
4	Airlangga Hartarto	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian	15
	Dudy Purwagandhi	Menteri Perhubungan	15
	Wihaji	Menteri Kependudukan dan Pembangunan Berkeluarga	15

THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

Jl. HOS. Cokroaminoto No 92, Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310
Telepon: +6221 3158032
Email: contact@theindonesianinstitute.com
www.theindonesianinstitute.com

5	Abdul Muhaimin Iskandar	Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat	14
	Arifatul Choiri Fauzi	Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	14
	Pratikno	Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	14
	Raja Juli Antoni	Menteri Kehutanan	14
6	Abdul Kadir Karding	Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	13
	Agus Harimurti Yudhoyono	Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	13
	Andi Amran Sulaiman	Menteri Pertanian	13
	Budi Santoso	Menteri Perdagangan	13
	Nasaruddin Umar	Menteri Agama	13
	Prasetyo Hadi	Menteri Sekretaris Negara	13
	Rini Widyantini	Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	13
	Rosan Perkasa Roeslani	Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal	13
7	Abdul Mu'ti	Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah	12
	Brian Yuliarto	Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi	12
	Erick Thohir	Menteri Badan Usaha Milik Negara	12
	Fadli Zon	Menteri Kebudayaan	12
	Hanif Faisol Nurofiq	Menteri Lingkungan Hidup	12
	Nusron Wahid	Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	12
8	Agus Andrianto	Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan	11
	Agus Gumiwang Kartasasmita	Menteri Perindustrian	11
	Saifullah Yusuf	Menteri Sosial	11
	Sugiono	Menteri Luar Negeri	11
9	Dody Hanggodo	Menteri Pekerjaan Umum	10
	Sakti Wahyu Trenggono	Menteri Kelautan dan Perikanan	10
	Supratman Andi Agtas	Menteri Hukum	10
	Yusril Ihza Mahendra	Menteri Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan	10
10	Rachmat Pambudy	Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	9
	Widiyanti Putri Wardhana	Menteri Pariwisata	9
11	Ario Bimo Nandito Ariotedjo	Menteri Pemuda dan Olahraga	8
	Maman Abdurrahman	Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah	8

Jl. HOS. Cokroaminoto No 92, Menteng, Kota Jakarta
Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310
Telepon: +6221 3158032
Email: contact@theindonesianinstitute.com
www.theindonesianinstitute.com

	Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara	Menteri Transmigrasi	8
	Muhammad Tito Karnavian	Menteri Dalam Negeri	8
12	Budi Gunawan	Menteri Koordinator Politik dan Keamanan	7
	Maruarar Sirait	Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman	7
13	Bahlil Lahadalia	Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral	6
	Natalius Pigai	Menteri Hak Asasi Manusia	6
	Sjafrie Sjamsoeddin	Menteri Pertahanan	6
	Zulkifli Hasan	Menteri Koordinator Pangan	6
14	Budi Arie Setiadi	Menteri Koperasi	4
	Yandri Susanto	Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal	4

Masalah utama yang ditemukan dalam Kabinet Merah Putih meliputi lemahnya komunikasi publik dengan isu utama tidak konsisten, impulsif, minim strategi, dan minim data. Dari sisi partisipasi publik, asas partisipasi oleh para menteri Kabinet Merah Putih hanya formalitas dan tidak bermakna (reaktif dan bukan proaktif). Kolaborasi lintas sektor masih terdapat fragmentasi koordinasi, tidak transformatif, dan minim inovasi. Kebijakan juga masih inkonsisten, sering berubah karena tekanan publik, bersifat seremonial belaka, bias kepentingan, serta tanpa arah jangka panjang dan strategi yang jelas. Dari sisi KPI, masih banyak program simbolik dan tidak menyentuh akar persoalan ditambah oleh kabinet yang gemuk.

Oleh karena itu, TII merekomendasikan beberapa hal kepada menteri Kabinet Merah Putih:

1. Dari sisi *Problem Stream*: Menyelesaikan Masalah Tata Kelola dan Kinerja Menteri
    a. Presiden harus memperbaiki komunikasi publik dengan menetapkan masalah prioritas nasional secara terbuka, dan menyampaikan *roadmap* kerja jangka pendek (6–12 bulan) agar publik dan aktor kebijakan memiliki orientasi yang sama.
    b. Evaluasi menteri dilakukan berkala dengan indikator yang transparan dan akuntabel: kapasitas profesional, urgensi peran menteri, dan prinsip AUPB.
    c. Memastikan mekanisme partisipasi publik dan masukan, serta kritik kebijakan ditindaklanjuti dengan jelas, efektif, transparan, dan akuntabel. Hal ini juga dimaksudkan untuk memperkuat partisipasi publik.
2. Dari sisi *Policy Stream*: Menyediakan Solusi Terukur dan Komunikatif
    a. Perbaiki komunikasi publik kementerian: gunakan bahasa resmi, berbasis data, dan hindari komentar yang menyerang pribadi atau suara kritis publik.
    b. Pastikan kebijakan dan program memiliki desain teknokratik yang realistis

Jl. HOS. Cokroaminoto No 92, Menteng, Kota Jakarta
Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310
Telepon: +6221 3158032
Email: contact@theindonesianinstitute.com
www.theindonesianinstitute.com

dan berdampak, bukan hanya simbolik. Hal ini juga perlu disusun dengan konsultasi publik yang komprehensif.

c. Melakukan perencanaan dan uji coba kebijakan yang bisa dipertanggungjawabkan.
d. Mendorong sistem pelaporan Mendorong sistem pelaporan capaian kinerja berbasis indikator yang dapat diakses publik untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas seperti laporan kuartalan atau tahunan, selaras dengan target pembangunan nasional.

3. Dari sisi *Politics Stream*: Membangun Momentum dan Dukungan Politik Publik
    a. Presiden dan pejabat tinggi membuka ruang partisipasi publik yang inklusif dan bermakna, terutama dari kelompok terdampak langsung, bukan hanya elite atau akademisi.
    b. Memperkuat forum kebijakan multi pihak untuk mengkoordinasikan beragam pemangku kepentingan, menjembatani perbedaan posisi, dan membangun legitimasi sosial-politik kebijakan, serta membangun kolaborasi yang kuat antar sektor.

Untuk Jaringan Kebijakan: Mendorong Kolaborasi Multiaktor:

a. Pemerintah perlu **meningkatkan kolaborasi antar kementerian dan antar sektor** (pemerintah, masyarakat sipil, akademisi, sektor bisnis, media) dalam seluruh siklus kebijakan.
b. Pemerintah perlu **memperkuat kapasitas masyarakat sipil** dengan dukungan kelembagaan dan pendanaan agar bisa terlibat aktif dalam pemantauan dan evaluasi kebijakan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi publik yang lebih bermakna.
c. Pemerintah harus **mengurangi hambatan birokrasi** agar jaringan kebijakan berjalan efektif dan responsif terhadap dinamika sosial-politik, memperkuat sistem pelaporan dan evaluasi berbasis data untuk mengukur capaian kebijakan secara obyektif dan akuntabel, serta melakukan evaluasi capaian kerja sebagai bagian dari komitmen terhadap tata kelola yang transparan dan akuntabel.

Narahubung
Putu Rusta Adijaya
Peneliti Bidang Ekonomi
The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research
putu@theindonesianinstitute.com